

# Teori Budaya Sosial & Politik

Ardillah Abu, M.Pd.



**PENERBIT CV KAIL MAHKOTA ABADI**

**TEORI BUDAYA, SOSIAL DAN POLITIK**

**Ardillah Abu**

Desain Cover :  
**Fikri Hamdani**

Editor:  
**Hasriani**

Tata Letak :  
**Darmawansyah**

Ukuran :  
**vi, 172 hlm, Uk: 14,8 x 21 cm**

ISBN : 978-623-93458-5-3

Cetakan Pertama:  
**Februari 2022**

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2022 by CV Kail Mahkota Abadi**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT CV KAIL MAHKOTA ABADI**

Jl. Sukabumi No. 19

Makassar 90231

Telp. 08114450990

Email: kailmahkotaabadi@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2022

# PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan *Buku Teori Budaya, Sosial dan Politik*. Adapun maksud dan tujuan penulis menyusun buku ini yakni diharapkan pembaca memiliki referensi dalam memahami berbagai teori-teori Budaya, sosial dan politik sebagai penguatan basis teoritis dan konseptual terutama dalam kajian-kajiann rumpun keilmuan sosial sebagai literatur dalam melakukan *mapping* problem yang berkaitan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat .

Tersusunnya buku referensi ini tentu bukan hanya sekedar usaha penulis saja. Dukungan moral dan materil dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Rektor IAIN Palu, Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalong, M.Pd, beserta para wakil Rektor dan bapak Dr. Mohammad Idham, S.Ag,M.Ag selaku dekan, beserta Wakil Dekan lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu.. Kemudian terima kasih kepada keluarga kedua orang tua tercinta Abu bakar dan Hj. Halijah, mertua, Istri tercinta Hasriani, Putri kami Muhimmah Falasifah Ardillah dan Putra kami Muhammad Faqih Ardillah, sahabat, rekan seperjuangandan pihak lainnya yang telah membantu secara moral dan materil.

Buku yang tersusun ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran kritik yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik

Palu, 16 Februari 2022

**Penulis**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Budaya, Sosial dan Politik.....	1
B. Konsep-Konsep Budaya, Sosial dan Politik.....	27
C. Peranan Teori dalam Pemecahan Masalah Budaya, Sosial dan Politik.....	47
BAB II PERKEMBANGAN TEORI BUDAYA, SOSIAL DAN POLITIK.....	55
A. Sejarah Perkembangan Teori Ilmu-Ilmu Sosial.....	55
B. Prespektif Perkembangan Teori Ilmu-Ilmu Sosial .....	79
BAB III PETA TEORI ILMU-ILMU SOSIAL.....	106
A. Peta Teori Budaya.....	106
B. Peta Teori Sosial .....	119
C. Peta Teori Politik.....	145
BAB IV HUBUNGAN ANTAR BUDAYA, SOSIAL DAN POLITIK.....	163
A. Hubungan Budaya dan Sosial.....	163
B. Hubungan Budaya dan Politik .....	165

C. Hubungan Sosial dan Politik .....	166
DAFTAR PUSTAKA.....	169
TENTANG PENULIS .....	172

# Pentingnya Memahami Teori Budaya, Sosial dan Politik

## A. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Budaya, Sosial dan Politik

### 1. Pengertian, Struktur, Fungsi dan Unsur-Unsur Pokok Teori

#### a. Pengertian Teori

Teori (*theory*) adalah susunan definisi, konsep, dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberikan pengertian teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, azas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu. Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti. Teori juga merupakan abstraksi dan pengertian atau hubungan suatu proporsi dan dalil.

Menurut Hedriksen (1992), pengertian teori adalah suatu susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk suatu bidang yang dipertanyakan. Menurut Kerlinger (1973), teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Selain itu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan jika ingin mengenal teori yaitu:

- 1) Teori adalah suatu proporsi yang terdiri dan konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secarajelas.
- 2) Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
- 3) Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Suatu teori adalah kumpulan dari beberapa konsep yang membentuk suatu pola realitas. Teori adalah suatu pernyataan yang menjelaskan secara khusus suatu proses, peristiwa, atau fenomena yang didasarkan pada observasi beberapa fakta, namun tanpa bukti absolut atau langsung. Beberapa teori membentuk suatu kelompok pertanyaan yang berkaitan satu sama lain sehingga memberi makna pada suatu rangkaian kejadian. Teori dapat diuji, dirubah, atau digunakan sebagai pemandu riset atau sebagai dasar evaluasi. Teori diperoleh

melalui dua metode pokok, yaitu secara deduktif dan induktif. Cara deduktif dimulai dengan menguji suatu gagasan umum, kemudian melakukan tindakan khusus untuk menarik suatu kesimpulan khusus. Sedangkan dengan cara induktif prosesnya berlangsung sebaliknya.

b. Struktur Teori.

Bedasarkan Cakupannya Teori Ilmu-Ilmu Sosial, terbagi Menjadi 3 yaitu :

- 1) *Grand Theory*/ Teori Besar (Analisi Menyeluruh) adalah teori-teori yang dianggap dapat menjelaskan gejala-gejala sosial-budaya tertentu di semua masyarakat atau kebudayaan, sehingga teori-teori semacam ini biasanya sangat abstrak. Teori-teori besar dalam ilmu sosial-budaya umumnya merupakan teori-teori mengenai “hakekat” dari kenyataan atau suatu gejala sosial-budaya tertentu, seperti misalnya teori tentang “masyarakat” dari Emile Durkheim, teori tentang “tindakan sosial” dari Talcott Parsons, teori kebudayaan dari E.B.Tylor, teori ke-pribadian dari Sigmund Freud, teori “masyarakat” dari Max Weber, teori tentang “mitos” dari Lévi-Strauss, dan sebagainya.
- 2) *Middle Range Theory*/ Teori Menengah (Analisis Sebagian) adalah teori teori yang dianggap dapat menjelaskan gejala-gejala sosial-budaya pada sejumlah masyarakat yang relatif sejenis. Teori-teori ini lebih sempit cakupannya daripada

teori-teori yang besar, namun di lain pihak juga terasa lebih kongkrit, Misal: Teori Kebudayaan Petani, Teori Jaringan Sosial.

- 3) Ideografis Theory/ Teori Kecil (Analisis Kasus/ Isu dari Fakta Empiris) lebih sempit lagi cakupannya, namun juga paling jelas keterkaitannya dengan realitas empiris.

Dalam ilmu-ilmu sosial-budaya dan Politik, teori-teori kecil dan menengah merupakan jenis teori yang paling banyak dihasilkan, karena setiap penelitian yang dilakukan dengan baik, dalam arti menggunakan konsep-konsep yang jelas, metode yang tepat, analisis yang tepat dan pasti akan menghasilkan suatu kesimpulan tertentu mengenai suatu kenyataan empiris

Kesimpulan tersebut menurut definisi di atas sudah merupakan teori, karena kesimpulan tersebut menyatakan hubungan antara suatu gejala atau fakta dengan gejala atau fakta yang lain, dan pernyataan tersebut telah diuji kebenarannya secara empiris lewat proses berfikir induktif dan deduktif.

#### c. Fungsi Teori

- 1) Menyimpulkan generalisasi dari fakta-fakta hasil penelitian
- 2) Memberikan kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian
- 3) Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi

4) Mengisi kekosongan dalam ilmu pengetahuan tentang gejala yang telah atau sedang terjadi.

d. Unsur-Unsur Pokok Teori

- 1) Asumsi-Asumsi Dasar
- 2) Model-Model
- 3) Konsep-Konsep
- 4) Metode-Metode Penelitian
- 5) Metode-Metode Analisis
- 6) Hasil-Hasil Analisis
- 7) Masalah-Masalah yang Ingin Dijawab atau Diselesaikan.

**2. Ruang Lingkup Teori Budaya, Sosil dan Politik**

a. Ruang Lingkup Teori Budaya

Teori kebudayaan dapat digunakan untuk keperluan praktis, memperlancar pembangunan masyarakat, di satu sisi pengetahuan teoritis tentang kebudayaan dapat mengembangkan sikap bijaksana dalam menghadapi serta menilai kebudayaan-kebudayaan yang lain dan pola perilaku yang bersumber pada kebudayaan sendiri.

Pengetahuan yang ada belum menjamin adanya kemampuan untuk dapat digunakan bagi tujuan-tujuan praktis karena antara teori dan praktek terdapat sisi antara (interface) yang harus diteliti secara tuntas agar dengan pengetahuan yang diperoleh lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan, konsekuensi dalam penerapan praktis dapat dikendalikan secara

ketat. Dengan demikian akan didapat pemahaman tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang melandasi pandangan-pandangan teoritis tentang kebudayaan.

Secara garis besar hal yang dibahas dalam teori kebudayaan adalah memandang kebudayaan sebagai:

- 1) Sistem adaptasi terhadap lingkungan.
- 2) Sistem tanda.
- 3) Teks, baik memahami pola-pola perilaku budaya secara analogis dengan wacana tekstual, maupun mengkaji hasil proses interpretasi teks sebagai produk kebudayaan.
- 4) Fenomena yang mempunyai struktur dan fungsi.
- 5) Dipandang dari sudut filsafat.

Sebelum lebih lanjut memahami teori kebudayaan ada baiknya kita meninjau terlebih dahulu wilayah kajian kebudayaan, atau lebih tepatnya Ilmu Pengetahuan Budaya. Jika menilik pembagian keilmuan seperti yang diungkapkan oleh Wilhelm Dilthey dan Heinrich Rickert, mereka membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua bagian, yaitu:

a) *Naturwissenschaften* (ilmu pengetahuan alam)

Dimana dalam proses penelitiannya berupaya untuk menemukan hukum-hukum alam sebagai sumber dari fenomena alam. Sekali hukum ditemukan, maka ia dianggap berlaku secara universal untuk fenomena itu dan gejala-gejala yang berkaitan dengan fenomena itu tanpa kecuali. Dalam *Naturwissenschaften*

ini yang ingin dicari adalah penjelasan (*erklären*) suatu fenomena dengan menggunakan pendekatan nomotetis.

b) *Geisteswissenschaften* (ilmu pengetahuan batin) atau oleh Rickert disebut dengan *Kulturwissenschaften* (ilmu pengetahuan budaya).

Dimana dalam tipe pengetahuan ini lebih menekankan pada upaya mencari tahu apa yang ada dalam diri manusia baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu. Terutama yang berkaitan pada faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperilaku dan bertindak menurut pola tertentu. Upaya memperoleh pengetahuan berlangsung melalui empati dan simpati guna memperoleh pemahaman (*verstehen*) suatu fenomena dengan menggunakan pendekatan ideografis.

Pada perkembangannya banyak ilmu-ilmu *geisteswissenschaften* dan *kulturwissenschaften* menggunakan pendekatan yang digunakan oleh *naturwissenschaften* seperti halnya Auguste Comte yang melihat suatu fenomena perkembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan positivistik.

Jika di tilik tentang konsep kebudayaan, maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu, pertama, Konsep kebudayaan yang bersifat materialistis, yang mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem yang merupakan hasil adaptasi pada lingkungan alam atau suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan

kehidupan masyarakat. Kajian ini lebih menekankan pada pandangan positivisme atau metodologi ilmu pengetahuan alam. Kedua, Konsep kebudayaan yang bersifat idelaistis, yang memandang semua fenomena eksternal sebagai manifestasi suatu sistem internal, kajian ini lebih dipengaruhi oleh penekatan fenomenologi.

Terlepas dari itu semua maka kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu fenomena sosial dan tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan warga masyarakat yang mendukung atau menghayatinya. Sebaliknya, keteraturan, pola, atau konfigurasi yang tampak pada perilaku dan tindakan warga suatu masyarakat tertentu dibandingkan perilaku dan tindakan warga masyarakat yang lain, tidaklah dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan kebudayaan.

Mengenai pembagian wilayah keilmuan ini terdapat kerancuan terutama yang berkenaan dengan peristilahan *human science* dan *humanities*. Pada masa Yunani dan Romawi, pendidikan yang berkaitan dengan *humanities* adalah yang berkaitan dengan pemberian keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan agar seseorang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya tentang kemanusiaan yang berbudi dan bijaksana secara sempurna. Adapun mata pelajaran yang diberikan untuk mencapai hal itu adalah filsafat, kesusastraan, bahasa (reotrika, gramatika), seni

rupa dan sejarah. Maka dari penjelasan ini, humanities atau humaniora lebih mendekati pada ilmu pengetahuan budaya.

Berbicara tentang kebudayaan maka tidak bisa lepas dari peradaban. Berikut ini beberapa dimensi dari peradaban, diantaranya; pertama, Adanya kehidupan kota yang berada pada tingkat perkembangan lebih “tinggi” dibandingkan dengan keadaan perkembangan di daerah pedesaan. Kedua, Adanya pengendalian oleh masyarakat dari dorongan-dorongan elementer manusia dibandingkan dengan keadaan tidak terkendalinya atau pelampiasan dari dorongan-dorongan itu.

Selain menganggap corak kehidupan kota sebagai lebih maju dan lebih tinggi dibandingkan dengan corak kehidupan di desa, dalam pengertian peradaban terkandung pula suatu unsur keaktifan yang menghendaki agar “kemajuan” itu wajib disebarkan ke masyarakat dengan tingkat perkembangan yang lebih rendah, yang berada di daerah-daerah pedesaan yang terbelakang.

Peradaban sebenarnya muncul setelah adanya masa kolonialisasi dimana ada semangat untuk menyebarkan dan menanamkan peradaban bangsa kolonial dalam masyarakat jajahannya, sehingga pada masa itu antara masyarakat yang “beradab” dan “kurang beradab” dapat digeneralisasikan sebagai corak kehidupan barat versus corak kehidupan bukan barat. Unsur lain yang terkandung dalam makna „peradaban adalah

kemajuan sistem kenegaraan yang jelas dapat dikaitkan dengan pengetahuan civilitas. Implikasinya adalah bahwa penyebaran sistem politik barat dapat merupakan sarana yang memungkinkan penyebaran unsur-unsur peradaban lainnya. Corak kehidupan kota atau kehidupan yang beradab pada hakikatnya berarti tata pergaulan sosial yang sopan dan halus, yang seakan-akan mengikis dan melicinkan segi-segi kasar.

Dari penjelasan definisi peradaban diatas yang hampir merangkum semua unsur adalah definisi yang diambil dari bahasa Belanda (*beschaving*) yang mengatakan bahwa peradaban meliputi tatacara yang memungkinkan berlangsungnya pergaulan sosial yang lancar dan sesuai dengan norma-norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat barat.

Dalam mengkaji kebudayaan, unit analisa atau obyek dari kajiannya dapat dikategorikan kedalam lima jenis data, yaitu,

- (a) Artifak yang digarap dan diolah dari bahan-bahan dalam lingkungan fisik dan hayati,
- (b) Perilaku kinetis yang digerakkan oleh otot manusia,
- (c) Perilaku verbal yang mewujudkan diri ke dalam dua bentuk yaitu tuturan yang terdiri atas bunyi bahasa yang dihasilkan oleh pita suara dan otot-otot dalam rongga mulut.
- (e) Teks yang terdiri atas tanda-tanda visual sebagai representasi bunyi bahasa atau perilaku pada umumnya. Baik artifak, teks, maupun perilaku manusia memperlihatkan

tata susunan atau pola keteraturan tertentu yang dijadikan dasar untuk memperlakukan hal-hal itu sebagai data yang bermakna, karena merupakan hasil kegiatan manusia sebagai makhluk yang terikat pada kelompok atau kolektiva, dan karena keterikatan itu mewujudkan kebermaknaan itu.

#### b. Ruang Lingkup Teori Sosial

Dalam kajian sosiologi, manusia adalah bahasan utama yang akan selalu disinggung. Manusia memiliki sifat yang sangat kompleks dan dinamis. Untuk memahami manusia dengan beragam karakter dan permasalahannya inilah, dibutuhkan berbagai landasan teori.

Terdapat setidaknya tiga teori utama sosiologi yang dapat dijadikan sebagai perspektif dalam memandang berbagai kajian sosial. Tiga teori utama sosiologi ini meliputi teori fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori interaksi simbolik.

Ketiga perspektif ini dinilai cukup berpengaruh dalam berbagai kajian sosiologi dan sering digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena sosial. Sekalipun dinamika teori sosial terus mengalami perkembangan sehingga memunculkan perspektif - perspektif baru mengenai sosiologi, namun ketiga perspektif ini masih banyak digunakan dan dirasa masih relevan untuk menganalisa fenomena sosial yang berlangsung masa kini.

Dalam kajian ilmu, teori adalah hal penting untuk melakukan analisis dalam memandang serangkaian fakta dan relasinya dengan sesuatu yang lain. Teori utama sosiologi ini pun akan membantu kita lebih memahami fenomena sosial yang berlangsung dalam masyarakat dan kaitannya dengan hal lain.

Baik teori fungsionalisme struktural, teori konflik, maupun teori konflik maupun teori interaksi simbolik akan membantu menjelaskan mengenai apa, kenapa dan bagaimana masyarakat bekerja, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan mengenai apa yang dapat kita lakukan terhadap masyarakat kita untuk menjadikannya lebih baik.

Dalam konteks sosiologi, perspektif ini digunakan sebagai dasar untuk menilai sekumpulan asumsi dan gagasan yang terjadi dalam proses sosial. Perspektif yang digunakan dalam memandang proses sosial ini tidak secara tunggal benar maupun salah. Masing-masing perspektif yang ada hanya memandang serta menganalisis masyarakat dengan cara yang berbeda.

#### 1). Teori Struktural Fungsional

Asumsi dasar dari teori struktural fungsional terletak pada konsep keteraturan masyarakat. Teori ini memandang bahwa masyarakat bersifat statis atau berada dalam perubahan secara berimbang, di mana setiap elemen masyarakatnya memiliki peran menjaga stabilitas tersebut.

Sebagaimana perspektif makro, teori ini mengulas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan organisasi atau masyarakatnya.

Teori struktural fungsional banyak mempengaruhi perkembangan teori sosiologi hingga sekarang. Pusat pertumbuhan teori sosial sendiri adalah di Amerika Serikat. Negara ini sekaligus menjadi tempat runtuhnya teori struktural fungsional itu sendiri, yang populer pada dekade 1930 an hingga 1960 an.

Budi Siswanto melalui bukunya “Teori Sosial” menyebutkan bahwa akar teori struktural fungsional terletak pada karya Emile Durkheim dan beberapa antropolog angkatannya seperti Auguste Comte dan Herbet Spencer. Mereka menawarkan sistem sintesis secara komprehensif dalam sistem pemikiran sosial (Siswanto, 2016: 1).

Asumsi utama dari teori ini adalah anggapan bahwa masyarakat merupakan organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling mengalami ketergantungan sebagai konsekuensi agar organisme tersebut dapat tetap bertahan hidup. Melalui pendekatan struktural fungsional ini, para sosiolog berharap dapat mencapai keteraturan sosial dalam masyarakat.

## 2) Teori Konflik

Teori konflik atau teori struktural konflik mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an. Pertama kali, teori ini muncul dalam sosiologi Amerika Serikat sebagai kebangkitan kembali dari berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya oleh Karl Marx dan Max Weber.

Jadi, ide dasar dari teori konflik ini diambil dari pemikiran kedua pemikir ini. Marx dan Weber secara tegas menolak gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung mengarah pada konsensus dasar atau harmoni, di mana struktur masyarakat yang berlangsung bekerja untuk kebaikan setiap orang.

Padahal, konflik dan pertentangan kepentingan masing-masing individu dan kelompok menurut Marx dan Weber adalah saling bertentangan, dan merupakan determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial.

## 3) Teori Interaksi-Simbolik

Teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk mencapai pemahaman interpretative terhadap fenomena sosial yang ada. Gagasan utama perspektif ini mengacu pada kenyataan sosial yang muncul melalui proses interaksi, dan berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol-simbol.

Pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung memusatkan perhatiannya pada perundingan terbuka mengenai definisi situasi mengenai arti-arti bersama.

Ada beberapa tokoh sosiologi modern yang turut memunculkan dan mendukung teori interaksionisme simbolik, seperti James Mark Baldwin, William James, Charles H. Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert Mead. Di antara para tokoh ini, Mead adalah tokoh yang paling populer sebagai perintis dasar teori tersebut.

Teori interaksionisme simbolik mulai dikembangkan oleh Mead di tahun 1920-an dan 1930-an. Kala itu, Mead merupakan seorang professor filsafat di Universitas Chicago. Sebagai seorang professor, ia banyak mengungkapkan gagasan - gagasannya mengenai interaksionisme simbolik kepada para mahasiswanya.

Dari para mahasiswanya yang banyak menerbitkan catatan dan kuliah-kuliahnya inilah, teori interaksionisme simbolik milik Mead mulai berkembang pesat. Apalagi, ketika buku yang menjadi rujukan utama teori interaksi simbolik, yakni: *Mind, Self, and Society* (1934) yang diterbitkan tak lama setelah Mead meninggal dunia.

Para mahasiswa Mead-lah yang kemudian banyak melakukan interpretasi dan mengembangkan teori ini. Herbert Blumer, sebagai salah satu mahasiswanya, adalah sosok yang

menciptakan istilah “interaksi simbolik” pada tahun (1937). Ia pula yang kemudian mempopulerkannya di kalangan komunitas akademis (Mulyana, 2001 : 68).

Dalam teori ini, Mead memandang bahwa perbuatan sebagai “unit paling inti” dalam teori tersebut (1982:27). Mead melakukan analisis perbuatan dengan memusatkan perhatiannya pada stimulus dan respons.

Interaksi simbolik sendiri adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Gagasan-gagasan tentang interaksi simbolik ini ditulis ulang oleh Blummer dalam tulisannya, yang kemudian juga diperkaya dengan gagasan-gagasan dari John Dewey, William I. Thomas, dan Charles H. Cooley (Mulyana, 2001 : 68).

Jika dirujuk lebih luas, perspektif interaksi simbolik berada di bawah perspektif yang lebih luas, yakni perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. Istilah fenomenologis digunakan oleh Maurice Natanson sebagai suatu istilah yang merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa untuk memahami tindakan sosial, kita harus fokus pada kesadaran manusia dan makna subjektifnya

Pada masa awal perkembangannya, teori interaksi simbolik seolah-olah tersembunyi di balik dominasi teori fenomenologisme Talcott Parsons. Namun, fungsionalisme yang

terus mengalami kemunduran di tahun 1950-an dan 1960-an, kemudian mendorong kemunculan kembali teori interaksionisme simbolik.

Teori interaksi simbolik ini lalu berkembang pesat hingga saat ini. Tokoh-tokoh interaksionisme simbolik era tahun 1960-an, seperti Howard S.Becker dan Erving Goffman, banyak menghasilkan kajian interpretif yang menawarkan pandangan alternatif mengenai sosialisasi dan hubungan antara individu dan masyarakat (Mulyana, 2001:59).

Inti utama dari interaksionisme simbolik sendiri adalah berfokus pada mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Perspektif ini memandang bahwa individu pada dasarnya bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, serta menampilkan perilaku yang rumit dan juga sulit diramalkan.

Jadi, sederhananya, perspektif interaksi simbolik menolak gagasan yang menyebut bahwa individu adalah organisme yang pasif, dengan perilaku yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya.

Individu adalah makhluk yang bersifat dinamis dan terus berubah. Karena individu ini adalah unsur utama pembentuk masyarakat, maka ini artinya masyarakat pun berubah melalui interaksi yang terjadi antar individu ini.

Kesimpulannya, interaksi inilah yang dianggap sebagai variable penting dalam menentukan perilaku manusia, dan bukannya pada struktur masyarakat. Struktur masyarakat sendiri dapat tercipta dan berubah dipegaruhi oleh interaksi manusia.

Fenomenologi Schutz pun juga sepakat dengan pemahaman ini, yang menyebutkan bahwa tindakan, ucapan, dan interaksi individu adalah prasyarat bagi eksistensi sosial siapa pun. Schutz memandang bahwa kategori pengetahuan pertama ini pada dasarnya bersifat pribadi dan unik bagi setiap individu dalam interaksi tatap muka dengan orang lain (Mulyana, 2001:61-62).

### **c. Ruang Lingkup Teori Politik.**

Berkaitan erat dengan pendefinisian teori, sebenarnya teori memiliki sifat atau karakter yang sederhana (*parsimonous*) dan sistematis. Sifat dan karakter teori ini merupakan konsekuensi logis dari generalisasi dan abstraksi yang dituntut dari sebuah teori. Selain itu, kedua sifat dan karakter teori ini membantu kita dalam memberikan kesimpulan (Ian Craib 1984 diterj. Simamora 1986, h.15) dan pemahaman tentang fenomena dan fakta yang dijelaskan oleh teori tersebut. Teori Sistem David Easton dari pendekatan tingkah laku dan Game Theory dari pendekatan Pilihan Rasional memiliki karakteristik sederhana (*parsimonious*) dan sistematis.

## 1) Fungsi dan Karakteristik Teori Politik

Mengapa teori politik diperlukan dalam ilmu politik? Paling tidak terdapat dua fungsi teori politik dalam ilmu politik. *Pertama*, sebagai dasar norma atau moral bagi perilaku politik termasuk bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedua, sebagai alat analisis atau tools of analysis dari fenomena-fenomena politik yang sedang terjadi. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan kembali untuk membuat generalisasi-generalisasi baru.

Dua fungsi teori politik ini berkaitan erat dengan pengkategorian teori politik di dalam ilmu politik. Thomas P. Jenkin (1967) sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008) dan Landman (2000) membedakan dua macam teori politik ke dalam *valuational theories* dan *empirical theories*, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Perbedaan kedua jenis teori tersebut didasarkan pada adanya nilai (*value*) yang terkandung dalam teori politik tersebut.

### a) *Valuational Theories*.

Teori politik dalam kategori pertama adalah teori yang mendasarkan pada norma, moral, dan nilai sehingga dapat menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Oleh karena adanya unsur norma-norma dan nilai ini, maka teori-teori ini dinamakan *valuational*

(mengandung nilai). Filsafat politik dan ideologi politik termasuk dalam teori politik kategori pertama ini.

b) *Empirical Theories*.

Berbeda dengan teori politik kategori pertama, teori politik ini “membangun hubungan-hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep dalam usaha untuk menjelaskan terjadinya fenomena politik yang diamati.” (Landman 2000, h.15). Apabila dikontraskan dengan jenis teori dalam kategori pertama, teori-teori kategori ini tidak terlalu mempersoalkan norma-norma. Teori dalam kategori ini biasanya menggunakan tahapan - tahapan seperti mendeskripsikan, mengklasifikasikan lalu mengomparasikan fenomena kehidupan politik untuk kemudian disistimatisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi. Miriam Budiardjo berpendapat teori empiris ini tidak mempersoalkan norma atau nilai, oleh karena itu teori-teori ini dapat dinamakan teori-teori yang bebas nilai (*value free*).

Setelah membahas arti, sifat atau karakter dan fungsi dari teori politik, penting dibahas juga tentang pembentukan teori politik secara singkat. Teori politik dibentuk secara deduktif dan induktif. Teori politik yang dibentuk secara deduktif sampai pada kesimpulan-kesimpulan teori tersebut dengan menerapkan argumentasi atau alasan terhadap premis-premis yang diajukan. Sebagai contoh, Teori Pilihan Rasional mengasumsikan bahwa

aktor-aktor politik memaksimalkan keuntungan pribadi atau kepentingan dirinya sendiri ketika melakukan pilihan dari alternatif-alternatif pilihan yang ada. Dari asumsi-asumsi dasar tersebut, ilmuwan politik mendeduksikan variasi dari hasil-hasil yang mungkin (Ward, 1995 & Levi 1997 sebagaimana dikutip Landman 2000).

Sedangkan teori politik yang dibentuk secara deduktif sampai pada kesimpulan-kesimpulan mereka melalui pengamatan terhadap fakta-fakta (Couvalis 1997 sebagaimana dikutip Landman, 2000). Sebagai contoh, seorang ilmuwan politik yang mengamati seringnya pemberontakan petani di daerah yang terdapat kesenjangan pemilikan tanah dan pendapatannya akan sampai pada kesimpulan bahwa kesenjangan mempunyai keterkaitan dengan terjadinya pemberontakan tersebut. Biasanya ilmuwan politik kemudian membandingkan bukti-bukti dari negara-negara atau wilayah-wilayah geografis lain untuk mengonfirmasi generalisasi ini.

## 2) Perbedaan antara Filsafat Politik, Teori Politik Empiris, dan Ideologi Politik.

Dalam mempelajari Teori Politik sering menjadi bingung dengan cakupan teori politik yang berbeda-beda. Sebagaimana disinggung sebelumnya, pengategorian teori politik ke dalam teori yang berlandaskan nilai (*valutional theories*) dan teori yang tidak berlandaskan nilai (*value-free theories* atau *empirical*

*theories*) membuat cakupan Teori Politik menjadi sangat luas. Cakupan yang luas tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang mahasiswa mengerti perbedaan jenis teori dari dua kategori tersebut. Hal yang sering terjadi adalah mahasiswa menyamakan antara teori- teori empiris dengan filsafat ataupun ideologi politik. Penyamaan inilah yang harus dihindari karena pemahaman seperti itu tidak tepat. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengerti lebih jauh perbedaan antara filsafat politik (kadang-kadang disebut juga pemikiran politik), teori politik empiris dan ideologi politik.

#### a) Filsafat/Pemikiran Politik

Secara harfiah filsafat diterjemahkan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan yang diperoleh dari perenungan atau kontemplasi untuk mencari kebenaran (Macridis 1983). Dalam ilmu politik, filsafat politik lebih diartikan sebagai sebuah cabang ilmu yang berusaha mencari penjelasan berdasarkan rasio tentang metafisika dan hakikat mendapatkan ilmu pengetahuan (epistemologi). Oleh karena itu, penjelasannya dicari melalui penjelasan hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan hubungan antara sifat dan hakikat di dunia fana (Budiardjo 2008). Hasil dari proses berpikir ini digunakan sebagai dasar atau patokan nilai dalam kehidupan bernegara.

Salah satu filsuf Yunani yang terkenal adalah Plato. Plato menulis tentang *The Republic* sebuah negara ideal yang dipimpin

oleh seorang *philosopher king* yang secara sengaja memisahkan diri dari hak milik dan ikatan keluarga supaya dapat memerintah untuk mencapai kepentingan bersama. Salah satu pemikiran Plato yang banyak dikutip orang adalah tentang keadilan. Menurutnya keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik seperti yang dicita-citakan. Oleh karena itu untuk dapat menanggulangi masalah ketidakadilan dan persoalan-persoalan politik lainnya di dunia fana, manusia haruslah memecahkan terlebih dahulu persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta.

Selanjutnya mengenai pembagian dalam filsafat politik, Magnis-Suseno, berbeda dengan Miriam Budiardjo dalam menetapkan pembagian tersebut. Menurut Magnis-Suseno (1983, h.12) filsafat terbagi menjadi dua cabang utama yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis (etika). Filsafat teoritis mempertanyakan “apa yang ada” seperti mempertanyakan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan, hakikat pengetahuan ataupun hakikat Yang Transenden (Magnis-Suseno 1983, h. 12). Sedangkan filsafat praktis atau etika mempertanyakan “apa yang mesti manusia lakukan terhadap yang ada itu”. Dengan begitu, filsafat praktis atau etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia (Magnis-Suseno 1983, h. 13).

Berbeda dengan Magnis-Suseno, Miriam Budiardjo (2008) yang mengutip Jenkin (1967) tidak membagi filsafat ke dalam kedua kelompok tersebut. Menurut Budiardjo, filsafat politik dilanjutkan dengan apa yang disebut teori politik yang sistemis (*systemic political theory*). Sebagaimana dikatakan oleh Budiardjo (2008), teori politik yang sistemis ini tidak memajukan pandangan sendiri tentang metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Dengan perkataan lain, teori politik sistematis ini tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi mencoba mewujudkan norma-norma itu ke dalam suatu program politik.

Teori-teori politik semacam ini merupakan langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma (tanpa mempertanyakan asal-muasal norma tersebut) dalam kegiatan politik. Sebagai contoh pada abad ke-19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan adanya sistem hukum serta sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Pembahasan teori-teori politik itu mendasarkan pandangan mengenai adanya hukum alam, sebuah pandangan yang sudah lazim pada saat itu. Hanya saja, teori-teori politik itu tidak lagi mempersoalkan lagi hukum alam tersebut.

## b) Teori Politik Empiris

Secara singkat teori politik empiris adalah generalisasi-generalisasi yang terdiri dari hubungan antar konsep yang memiliki hubungan sebab akibat ataupun hubungan antar konsep non kausalitas yang tujuannya untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik.

## c) Ideologi Politik

Ideologi politik yang berisi nilai-nilai dan ide-ide membimbing cara berpikir dan perilaku politik seseorang yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (Macridis 1983, h. 4).

Sumber dari ideologi politik, tidak lain dan tidak bukan adalah filsafat politik dan teori politik. Masyarakat yang telah percaya terhadap nilai-nilai atau ide-ide tertentu memaksakan teori politik atau pun filsafat politik yang mengandung nilai-nilai tersebut untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat tersebut. Sering kali ideologi politik yang terbentuk memiliki bentuk yang sangat sederhana, kadang-kadang terdistorsi dari sumber-sumbernya.

Diakui oleh Macridis bahwa sangat sulit untuk dimengerti kapan dan dalam lingkungan apa sebuah teori politik atau pun filsafat politik mentransformasi menjadi sebuah ideologi politik. Dengan perkataan lain, adalah tidak mudah menjelaskan kapan transformasi dari teori atau filsafat politik terjadi dan menjadi

sebuah dasar bagi gerakan yang berorientasi pada tindakan (*action-oriented movement*). Selanjutnya Macridis menjelaskan bahwa ideologi politik memiliki beberapa fungsi (Macridis 1983, h. 9-13). Secara umum, ideologi politik sebagai seperangkat ide dan kepercayaan yang dianut oleh sejumlah orang atau kelompok masyarakat ini menentukan apa yang bernilai apa yang tidak, apa yang dijaga keberlangsungannya apa yang harus dirubah, tentu saja membentuk pemikiran perilaku serta tindakan- tindakan politik dari kelompok masyarakat yang menganut ideologi politik tersebut. Dengan perkataan, ideologi selain memprovokasi, ia juga memberikan kerangka kerja yang mendasar bagi tindakan-tindakan politik tersebut.

Secara lebih khusus, ideologi politik memiliki fungsi-fungsi seperti (1) memberikan legitimasi, (2) sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas, (3) Memperlihatkan pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan, (3) sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi, dan (4) sebagai landasan bagi tindakan politik. Fungsi-fungsi ideologi politik ini tergambarkan dengan baik oleh Hitler ketika ia menjabat sebagai *Chancellour of Germany* (pimpinan Jerman) dan mempropagandakan Nazi sebagai ideologi terbaik bagi rakyat Jerman (Macridis 1983, h. 172-198).

Selain memiliki fungsi, ideologi politik dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan:

(a) Ideologi yang mempertahankan *status quo*

Ideologi yang mempertahankan dan merasionalisasikan keteraturan- keteraturan ekonomi, sosial, dan politik dalam waktu tertentu dan dalam masyarakat apa pun. Contoh: Liberalisme, Komunisme di (bekas negara) Uni Soviet.

(b) Ideologi radikal atau ideologi yang revolusioner

Ideologi ini mengadvokasi perubahan-perubahan yang menyeluruh dan secara intensif serta revolusioner. Contoh: Marxisme, Fasisme.

(c) Ideologi reformis

Ideologi reformis ini mengadvokasikan perubahan-perubahan secara bertahap. Contoh: Developmentalisme.

## **B. Konsep-Konsep Budaya, Sosial dan Politik**

### **1. Konsep-Konsep Budaya**

Teori kebudayaan adalah usaha untuk mengonseptualkan kebermaknaan itu, untuk memahami pertalian antara data dengan manusia dan kelompok manusia yang mewujudkan data itu. Teori kebudayaan adalah usaha konseptual untuk memahami bagaimana manusia menggunakan kebudayaan untuk melangsungkan kehidupannya dalam kelompok, mempertahankan kehidupannya melalui penggarapan lingkungan alam dan memelihara keseimbangannya dengan dunia supranatural.

Keragaman teori kebudayaan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu, (a) perspektif perkembangan sejarah yang melihat bahwa keragaman itu muncul karena aspek-aspek tertentu dari kebudayaan dianggap belum cukup memperoleh elaborasi. Dan (b) perspektif konseptual yang melihat bahwa keragaman muncul karena pemecahan permasalahan konseptual terjadi menurut pandangan yang berbeda-beda. Dalam memahami kebudayaan kita tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip dasarnya. de Saussure merumuskan setidaknya ada tiga prinsip dasar yang penting dalam memahami kebudayaan, yaitu:

- a. Tanda (dalam bahasa) terdiri atas yang menandai (*signifiant, signifier*, penanda) dan yang ditandai (*signifié, signified*, petanda). Penanda adalah citra bunyi sedangkan petanda adalah gagasan atau konsep. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya konsep bunyi terdiri atas tiga komponen (1) artikulasi kedua bibir, (2) pelepasan udara yang keluar secara mendadak, dan (3) pita suara yang tidak bergetar.
- b. Gagasan penting yang berhubungan dengan tanda menurut Saussure adalah tidak adanya acuan ke realitas obyektif. Tanda tidak mempunyai *nomenclature*. Untuk memahami makna maka terdapat dua cara, yaitu, pertama, makna tanda ditentukan oleh pertalian antara satu tanda dengan semua tanda lainnya yang digunakan dan cara kedua karena merupakan unsur dari batin manusia, atau terekam sebagai

kode dalam ingatan manusia, menentukan bagaimana unsur-unsur realitas obyektif diberikan signifikansi atau kebermanaknaan sesuai dengan konsep yang terekam.

- c. Permasalahan yang selalu kembali dalam mengkaji masyarakat dan kebudayaan adalah hubungan antara individu dan masyarakat. Untuk bahasa, menurut Saussure ada *langue* dan *parole* (Bahasa dan tuturan). *Langue* adalah pengetahuan dan kemampuan bahasa yang bersifat kolektif, yang dihayati bersama oleh semua warga masyarakat; *parole* adalah perwujudan *langue* pada individu. Melalui individu direalisasi tuturan yang mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku secara kolektif, karena kalau tidak, komunikasi tidak akan berlangsung secara lancar.

Gagasan kebudayaan, baik sebagai sistem kognitif maupun sebagai sistem struktural, bertolak dari anggapan bahwa kebudayaan adalah sistem mental yang mengandung semua hal yang harus diketahui individu agar dapat berperilaku dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat diterima dan dianggap wajar oleh sesama warga masyarakatnya.

## 2. Konsep-Konsep Sosial

Konsep-konsep sosial seperti masyarakat, peran, konflik sosial, lembaga sosial, kebiasaan (mores), norma, jarang didefinisikan cara serupa atau sama. Di samping itu masalah lain yang muncul ketika grand theory yang bukan hasil seorang

peneliti, mendefinisikan terminologi dengan cara yang berbeda dibanding dengan ahli sosial yang melakukan penelitian lapangan. Fakta bahwa terdapat tingkat persetujuan tentang makna dari penguasaan konsep-konsep pokok dalam sosial yang menyatakan bahwa secara sosiologis perspektif itu dapat memberikan suatu kontribusi substansial untuk membantu penguasaan dasar dalam memecahkan permasalahan sosial dan membuat keputusan tentang isu sosial yang penting.

Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam sosiologi tersebut, mencakup;

a. Masyarakat

“Masyarakat” adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan merupakan sistem sosial yang pengaruh-mempengaruhi satu sama lain (Shadily, 1980: 31; Soekanto, 1993: 466). Dengan demikian hidup bermasyarakat merupakan bagian integral karakteristik dalam kehidupan manusia. Kita tidak dapat membayangkan, bagaimana jika manusia tidak bermasyarakat. Sebab sesungguhnya individu-individu tidak bisa hidup dalam keterpencilan sama sekali selama-lamanya, karena manusia itu adalah mahluk sosial. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk hidup sebagai manusia (Campbell, 1994: 3). Kesalingtergantungan individu atas lainnya maupun kelompok

ini menghasilkan bentuk-bentuk kerjasama tertentu yang bersifat ajeg, dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu yang merupakan sebuah keniscayaan.. Jadi, sebuah masyarakat pada dasarnya adalah sebetuk tatatanan; ia mencakup pola-pola interaksi antar manusia yang berulang secara ajeg pula. Tatanan ini bukan berarti tanpa konflik ataupun tanpa kekerasan, semuanya serba mungkin, serta kadarnya jelas bervariasi dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Akan tetapi, bagaimanapun rendahnya suatu masyarakat tetap tidak hanya sekedar penjumlahan beberapa manusia, melainkan sebuah pengelompokan yang teratur dengan keajegan-keajegan interaksi yang jelas.

#### b. Peran

“Peran” adalah satuan keteraturan perilaku yang diharapkan dari individu. Tiap-tiap hari, hampir semua orang harus berfungsi dalam banyak peran yang berbeda. Peran dalam diri seseorang ini sering menimbulkan konflik. Sebagai contoh, para guru sekolah dasar perempuan, diharapkan untuk mempersiapkan pengajaran IPS di sekolah tiap hari sebagai kewajiban profesinya, namun di sisi lain ia juga bertanggung jawab sebagai istri dalam urusan keluarganya. Pada saat sore dan malam hari ia mengurus anak-anaknya di rumah serta keperluan rumah tangga lainnya seperti mempersiapkan makanan untuk anak-anak dan suaminya, mengawasi anak-

anaknya belajar, membereskan dan merawat kebersihan ruangan, perabot rumah tangga, dan sebagainya.. Inilah yang sering disebut sebagai peran ganda, dan peran semacam ini hampir terjadi pada setiap profesi.

c. Norma

Suatu 'norma' adalah suatu standard atau kode yang memandu perilaku masyarakat.. Norma-norma tersebut mengajarkan kepada kita agar perilaku kita itu benar, layak atau pantas.. Dalam kehidupan masyarakat kita, orang-orang sering diharapkan untuk berpakaian dan berbicara yang sesuai dengan tuntutan dan kondisinya. Seseorang yang akan menghadiri pesta pernikahan, jelas akan berpakaian lain dibanding ia akan berolahraga. Begitu juga kebiasaan untuk anak-anak sering diharapkan untuk bertindak, berbicara dan berperilaku, sopan sesuai dengan kehendak orang dewasa. Sebaliknya juga pada orang dewasa itu sendiri biasanya diharapkan untuk bisa bertindak sopan ataupun hormat jika ia bertamu ke rumah orang lain.

d. Sanksi

'Sanksi' adalah suatu rangsangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (Soekanto, 1993: 446). Begitu juga hal yang serupa dikemukakan K. Daniel O'Leary dan Susan G. O'Leary dalam *Classroom Management: The Successful Use of Behavior Modification* mengemukakan bahwa sanksi merupakan

upaya dengan suatu konsekuensi yang diduga dapat mengurangi atau menurunkan kemungkinan untuk melakukan perbuatan melanggar untuk masa yang akan datang O'Leary dan O'Leary, 1977: 110).

e. Interaksi Sosial

'Interaksi sosial' adalah proses sosial yang menyangkut hubungan timbal-balik antar pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok. (Poponoe, 1983: 104; Soekanto: 1993: 247). Interaksi sosial tersebut merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Mengingat dalam interaksi sosial tersebut di samping ruang-lingkupnya sangat luas dan bentuknya yang dinamis (Gillin dan Gillin, 489). Bagi siswa di kelas konsep 'interaksi sosial'.

f. Konflik Sosial

Konflik sosial adalah merupakan pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain. Konflik sosial juga bisa berupa kegiatan dari suatu kelompok yang menghalangi atau menghancurkan kelompok lain, walaupun hal itu tidak menjadi tujuan utama aktivitas kelompok tersebut (Soekanto, 1993: 101). Dalam wujudnya konflik sosial itu bisa tersembunyi tersembunyi (covert) maupun terbuka. Konflik sosial merupakan salah satu bentuk interaksi sosial di mana ekstrem yang satu mengarah ke integrasi sosial yang sudah menjadi suatu general agreements yang memiliki daya

mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan, dan yang lain ke konflik sosial. Tercapainya 'tata tertib' dan 'konflik' adalah dua kenyataan yang melekat bersama dalam setiap sistem sosial. Sebab tumbuhnya tata tertib sosial atau sistem nilai yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakatnya, sama sekali tidak berarti lenyapnya konflik dalam masyarakat. Justru sebaliknya, tumbuhnya tata tertib sosial mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial dalam masyarakat. Dengan demikian jika kita berbicara tentang 'stabilitas' dan 'instabilitas' dari suatu sistem sosial, maka yang di kita maksudkan adalah tidak lebih dari menyatakan derajat keberhasilan atau kegagalan dari suatu tertib normative dalam mengatur kepentingan yang saling berkonflik (Lockwood, 1965: 285).

#### g. Perubahan Sosial

'Perubahan sosial' mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu (Ritzer, 1987: 560). Kemudian sosiolog lain mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat (Parsel, 1987: 586). Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial segala transformasi pada individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap

dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

#### h. Permasalahan sosial

Istilah "permasalahan sosial" merujuk kepada suatu kondisi yang tidak diinginkan, tidak adil, berbahaya, ofensif, dan dalam pengertian tertentu mengancam kehidupan masyarakat.. Dalam pendekatannya, studi tentang permasalahan sosial dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni pendekatan; (1) realis dan obyektif, (2) pendekatan pendekatan konstruksionisme sosial. (Pawluch, 2000: 995). Perhatian utama kelompok yang memakai pendekatan realis dan obyektif mengidentifikasi berbagai kondisi dan kekuatan dasar yang menjadi sebab dari permasalahan tersebut, seringkali dengan sebuah pandangan yang mengutamakan tindakan *amelioratif* (peningkatan nilai makna dari makna biasa mapun buruk menjadi makin baik). Sedangkan pendekatan konstruksionisme sosial, tidak memusatkan pada perhatian kondisi-kondisi obyektif, tetapi mengarahkan pada suatu definisi proses sosial di mana kondisi tersebut muncul sebagai permasalahan

#### i. Penyimpangan

Istilah "penyimpangan" atau deviance sebenarnya dalam sosiologi telah lama ada sejak awal kelahiran ilmu tersebut. Akan tetapi makna sosiologisnya baru muncul belakangan. Para sosiolog dan kriminolog mengartikan sebagai perilaku yang

terlarang, perlu dibatasi, disensor, diancam hukuman, atau label lain yang dianggap buruk sehingga istilah tersebut sering dipandang dengan "pelanggaran aturan" (Rock, 2000: 227-228). Namun demikian istilah "penyimpangan" tersebut tetap lebih luas daripada kriminalitas karena yang menyimpang itu tidak sepenuhnya melanggar secara kriminal. Dalam sosiologi, istilah "pemyimpangan" memang selalu tidak jelas bagi para sosiolog. Oleh karena itu setiap sosiolog punya punya pemahaman sendiri (bersifat adhoc) atas istilah tersebut. Namun dmikian bagi kaum sosiolog untuk mengkaji beberapa perilaku yang dianggap "aneh" dapat memenuhi kebutuhan untuk memuaskan rasa ingintahu, memahami hal-hal aneh, merupakan alasan yang sah bagi sosiologi untuk mengadakan kajaian ilmiah atas istilah tersebut.

j. Globalisasi

Istilah "globalisasi" merujuk pada implikasi tidak berartinya lagi jarak nasional, regional, maupun teritorial, sehingga apapun yang terjadi dan berlangsung di satu tempat, bukan jaminan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut tidak membawa pengaruh di tempat lain (2002: Ohmae, 3-30). Runtuhnya suatu ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu negara, bisa jadi negara lain juga ikut merasakan dampaknya. Suasana chaos di satu negarabangsa, sangat berimbas ke negara lain. Begitu juga budaya "meyimpang" yang tumbuh subur di satu negara, tidak

menutup kemungkinan cepat "menular" ke negara lain. Ibarat dunia yang semakin tidak terbatas lagi, globalisasi dapat dimetaforakan sebagai kamar yang 45 tanpa sekat, di mana ratusan negara-bangsa seolah menyatu, seakan-akan berada dalam satu keluarga.

k. Patronase

Istilah "patronase" dalam istilah ilmu-ilmu sosial lebih banyak dikaitkan dengan birokrasi sehingga dikenal "birokrasi patrimonial". Dalam birokrasi patrimonial ini serupa dengan lembaga "perkawulaan", di mana "patron" adalah "gusti" atau "juragan", dan klien adalah "kawula". Hubungan antara gusti dan kawula tersebut bersifat ikatan pribadi, implisit dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar tali perhubungan (Kuntjoro-Jakti, 1980: 6).

l. Kelompok

Konsep "kelompok" atau "group" secara umum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang disatukan oleh suatu prinsip, dengan pola rekrutmen, hak dan kewajiban tertentu. (Holy, 2000: 421). Konsep ini sangat dominan dalam kajian sosiologi karena dalam kajian "kelompok" tersebut difahami berbagai interaksi yang bersifat kebiasaan (habitual), melembaga, atau bertahan dalam waktu relatif lama, yang biasanya terjalin antar kelompok.

#### m. Patriarki

Secara harfiah "patriarki" berarti aturan dari pihak ayah. Istilah ini memiliki penggunaan yang cukup luas namun umumnya memiliki kecenderungan untuk mendeskripsikan kondisi superioritas laki-laki atas perempuan (Cannel, 2000: 734). Dalam sejarah modern istilah tersebut muncul oleh Henry Maine dengan karyanya *Ancient Law* (1861). Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa keluarga patriarkal merupakan dasar dan unit universal dari masyarakat (Coward, 1983: 18), yang berasumsi bahwa organisasi manusia sepenuhnya bersifat sosial sejak awal. Pendapat tersebut tentu saja mendapat kritik keras dari aliran-aliran evolusi keluarga dan masyarakat, seperti Bachoven (1861, McLennan (1865), dan Morgan (1877), karena bagi mereka bahwa terciptanya masyarakat modern melalui berbagai tahapan budaya.

#### n. Hirarki

Konsep "hirarki" merujuk kepada suatu jenjang atau tatanan atau peringkat kekuatan, prestise atau otoritas. Ditinjau dari historisnya secara umum konsep hirarki diserap oleh ilmu-ilmu sosial pada mulanya hanya mengacu kepada gereja, pemerintahan pendeta, dan biasanya Gereja Katolik Roma. Dalam pengertian yang lebih luas merujuk pada organisasi bertingkat dari para pendeta atau paderi (Halsey, 2000: 433).

### 3. Konsep-Konsep Teori Politik

Pengenalan secara singkat mengenai konsep-konsep sangat penting agar mahasiswa dapat mendalami di sepanjang pembelajaran ini. Adapun konsep-konsep yang akan dibahas mencakup antara lain kekuasaan, otoritas dan legitimasi; negara, kelas, dan elit; pilihan-pilihan rasional; modernisasi, pembangunan, dan ketergantungan; *civil society*, gerakan sosial baru, dan feminisme; transisi demokrasi, representasi dan demokrasi. Konsep-konsep ini merupakan konsep yang membentuk teori-teori politik.

#### a. Kekuasaan, Otoritas, dan Legitimasi

##### 1) Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemilik kekuasaan. Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa inti atau substansi dari kekuasaan itu sendiri adalah hak untuk meminta atau bahkan memaksa orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang berkuasa.

##### 2) Otoritas

Kekuasaan tidak hanya memiliki „kemampuan“ agar orang yang dikuasai memenuhi keinginan yang berkuasa, namun juga disertai „hak“ untuk melakukan hal tersebut,

itulah otoritas atau kewenangan. Ini yang membedakan antara kekuasaan dengan wewenang, yakni adanya „hak“ yang diakui.

### 3) Legitimasi

Legitimasi didefinisikan sebagai wewenang yang tidak saja dianggap sah secara hukum, namun juga mendapat pengakuan dan dukungan kepercayaan dari rakyat. Dari definisi ini berarti cakupan wilayah dari legitimasi lebih luas, dalam arti pihak yang dikuasai lebih besar lagi dibandingkan dengan kekuasaan atau wewenang. Legitimasi lebih sering diacukan kepada eksistensi sebuah pemerintahan.

## b. Negara, Kelas dan Elite

### 1) Negara

Konsep negara dapat dikatakan sebagai konsep tertua karena telah menjadi fokus penelitian ilmu politik sejak ilmu politik ini ada. Sebelum Perang Dunia I, negara menjadi pusat kajian ilmu politik; karena itu lah maka pendekatan pada masa itu disebut sebagai pendekatan kelembagaan. Negara didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk mengendalikan masyarakat. Wewenang dan kekuasaan tertinggi dijalankan oleh sejumlah pejabat ini biasanya diselenggarakan atas dasar hukum. Negara, selain

mampu menuntut ketaatan warga negaranya untuk mematuhi dasar hukum yang berlaku juga memiliki kekuasaan memaksa sebagai pemegang monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah di dalam wilayah negara tersebut

## 2) Kelas

Pemikiran-pemikiran Marx tentang kelas menjadi awal dari pengonstruksian masyarakat dalam dua kategori: kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Posisi dominan dari kelas berkuasa ini didasarkan pada dominasi pemilikan alat-alat produksi. Konflik antara kelas yang berkuasa dengan kelas yang dikuasai terjadi secara terus menerus mengikuti dialektika materialisme sejarah. Garis konflik kelas ditarik secara paling tegas dalam masyarakat kapitalis modern, karena dalam masyarakat semacam itu pemisahan kepentingan-kepentingan ekonomi terlihat paling nyata mengingat adanya polarisasi antara pemusatan kekayaan yang luar biasa pada satu sisi dan pemusatan kemiskinan pada sisi yang lain. Dialektika tertinggi Marx menghasilkan masyarakat tanpa kelas di mana kelas kapitalis dikalahkan oleh kelas pekerja yang kemudian diikuti dengan terbentuknya masyarakat tanpa kelas.

### 3) Elite

Konsep dan teori elit muncul sebagai reaksi dari teori Marx. Para teoritis elit ini berargumentasi bahwa dalam baik dalam masyarakat otoriter ataupun demokratis selalu terdapat suatu kelompok kecil yang berkuasa atas massa rakyat. Dengan begitu, selalu ada unsur oligarki dalam kepemimpinan masyarakat. Kelompok kecil ini dinamakan “elit” dan merupakan minoritas kecil yang kohesif dan menjadi pimpinan bagi massa (kelompok masyarakat di luar kelompok elit yang tidak terorganisir dan apatis).

Sumber dari kekuasaan elit tidak terlalu menjadi pusat perhatian di awal perkembangan teori elit ini (awal abad ke-20). Namun di tahun 1960-an, teori elit diperluas dengan munculnya konsep “elit strategis” yang dikembangkan oleh Suzanne Keller (1963). Pengembangan konsep ini mengarah pada pengkhususan dari elit-elit di mana di tiap bidang, seperti politik, ekonomi, keilmuan, militer, budaya memiliki elit-elit khususnya tersendiri. Namun secara kolektif, elit-elit ini, di dalam masyarakat, dinamakan *ruling-class*.

#### c. Pilihan Rasional

Asumsi dasar dari Teori Pilihan Rasional adalah bahwa pelaku yang melakukan pilihan rasional berdasarkan tindakan-tindakan rasional yang secara sengaja ia lakukan untuk

memaksimalkan keuntungannya. Siapakah aktor-aktor tersebut? Para pelaku tindakan rasional ini adalah politisi, birokrat, pemilih (dalam berbagai acara pemilihan) dan aktor ekonomi. Mereka pada dasarnya hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri karena itu mereka selalu mencari cara agar dapat mengoptimalkan kepentingan mereka dengan cara seefisien mungkin.

#### d. Modernisasi, Pembangunan dan Ketergantungan

##### 1. Modernisasi

Pengertian modernisasi dikaitkan dengan persepsi kemajuan dan digunakan dalam perbandingan antara negara miskin yang biasanya adalah (negara pertanian) dan negara kaya (negara industri).

##### 2. Pembangunan

Pembangunan politik ditekankan pada penguatan nilai-nilai dan praktek-praktek demokrasi kapitalis negara-negara Barat seperti: partisipasi politik, praktek multipartai tetapi haruslah menunjang pembangunan ekonomi. Dari penelitian-penelitian empiris yang dilakukan oleh Lipset memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dan legitimasi politik di mana pembangunan ekonomi memfasilitasi pembentukan dan keberlangsungan demokrasi (Lipset 1959). Lucian Pye (1965 dan 1966) berargumen

sebaliknya di mana demokrasilah yang memfasilitasi pembangunan ekonomi.

### 3. Ketergantungan.

Kemiskinan yang dialami negara-negara pertanian Dunia III adalah akibat struktur perekonomian dunia yang eksploitatif sehingga surplus dari negara-negara ini beralih ke negara-negara industri maju. Perdagangan dunia yang bebas merupakan arena di mana eksploitasi ini terjadi.

Berpangkal pada materialisme yang dikembangkan Karl Marx, teori-teori dalam kelompok ini menyangkal tesis Marx bahwa kapitalisme akan menjadi produksi tunggal, menciptakan proses maupun struktur masyarakat yang sama di semua negara di dunia ini.

Kapitalisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi korban imperialisme tidak sama dengan perkembangan kapitalisme di negara imperialis yang menyentuhnya. Kapitalisme di *periferi* (pinggiran) merupakan kapitalisme yang sakit yang sulit berkembang, oleh karena itu dinamikanya pun juga berlainan.

#### e. *Civil Society*, Gerakan Sosial Baru, dan Feminisme

Gerakan Sosial Baru merupakan bentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Gerakan ini bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik

dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Untuk mencapai tujuannya, gerakan ini mendirikan berbagai kelompok yang memperdulikan masalah-masalah baru seperti lingkungan, gerakan perempuan, hak asasi manusia dan gerakan anti-nuklir. Di antara kelompok kepentingan itu ada yang bersifat sosial (seperti menyediakan air bersih), ada yang lebih bersifat advokasi (seperti penegakan hak asasi).

Para aktivis gerakan ini sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan merasa “terasingkan” (*alienasi*) dari masyarakat. Untuk skala nasional, para aktivis gerakan ini menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya (*self help*) masyarakat, terutama masyarakat lokal.

Sementara itu kelompok-kelompok ini terus menerus berinteraksi dengan badan eksekutif, dengan tetap memperhatikan kedudukan “otonom”nya terhadap negara (maka sering dinamakan *Non-Governmental Organizations* atau NGO). Juga dibina interaksi dengan unsur-unsur kemasyarakatan lainnya termasuk dunia ekonomi dan industri.

#### f. Transisi Demokrasi

Kebanyakan dari negara-negara Dunia III telah mengubah rancangan desain kelembagaannya dari sistem yang otoriter ke arah sistem yang demokratis. Tahap yang krusial dalam transisi

ini pengonsolidasian sistem yang demokratis tersebut. Banyak aspek yang dapat berkontribusi dalam tahap ini antara lain peningkatan kondisi perekonomian yang menumbuhkan kelas menengah baru, perkembangan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat pada umumnya serta *good will* dari elit yang berkuasa.

g. Demokrasi dan representasi

Selain konsep negara, konsep demokrasi merupakan konsep yang juga sudah ada sejak ilmu politik ada. Sejak abad ke-19 perkembangan demokrasi konstitusional telah bergeser, dari penerapan *rule of law* yang *rigid* sampai menjadi penanggung jawab bagi terselenggaranya *welfare state* di abad ke-20.

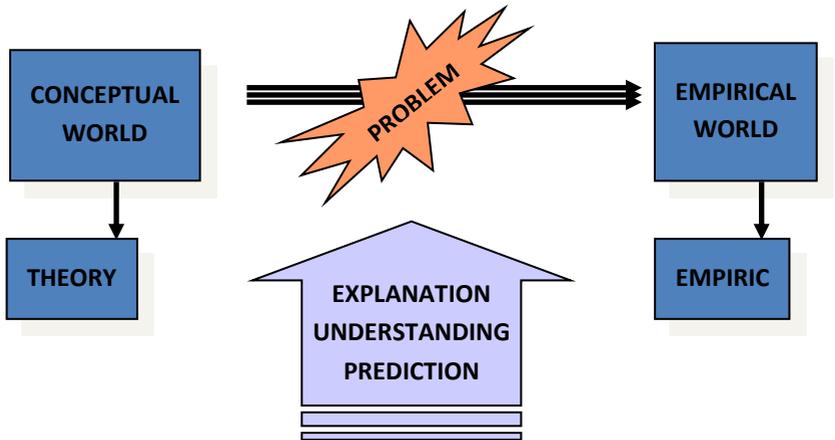
Demokrasi konstitusional abad ke-21 ini memperluas cakupannya untuk meningkatkan representasi dalam sebuah sistem demokratis. Untuk itu di samping diperlukan pemerintah, parlemen dan lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel, *concern* dari penelitian-penelitian tentang bagaimana meningkatkan kualitas sistem representasi: mulai dari sistem kepartaian, sistem elektoral dan keterwakilan baik dari kelompok-kelompok atau unsur *civil society* lainnya termasuk media massa untuk pengawasan terhadap sistem representasi ini.

## C. Peranan Teori dalam Pemecahan Masalah Budaya, Sosial dan Politik

### 1. Pengertian Masalah

Ada beberapa pengertian Masalah berkaitan dengan dimensi Budaya, Sosial dan Politik sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang mengandung keragu-raguan dan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat (*anomie*)
- b. Adanya kesenjangan (*gap*) antara sesuatu yang seharusnya (*das sollen, teori*) dengan sesuatu yang senyatanya (*das sein, empiris*), kesenjangan (*gap*) antara teori Budaya, social dan Politik dan praktek
- c. Adanya sesuatu yang dianggap masih kurang (*dis-distribution*) Adanya ketidakseimbangan (*dis-equity/dis-balance*)
- d. Adanya sesuatu yang dianggap tidak cocok/tidak relevan (*defesiensi*) Sesuatu yang tidak layak (*veasible*), dianggap layak dan dipakai terus
- e. Masalah sosial ada yang bisa terpecahkan dan ada pula yang tidak bisa terpecahkan (*social connatus*)
- f. Dalam penelitian sosial, permasalahan sosial (*social problems*) dapat dirumuskan secara teoritis, empiris, dan normatif.



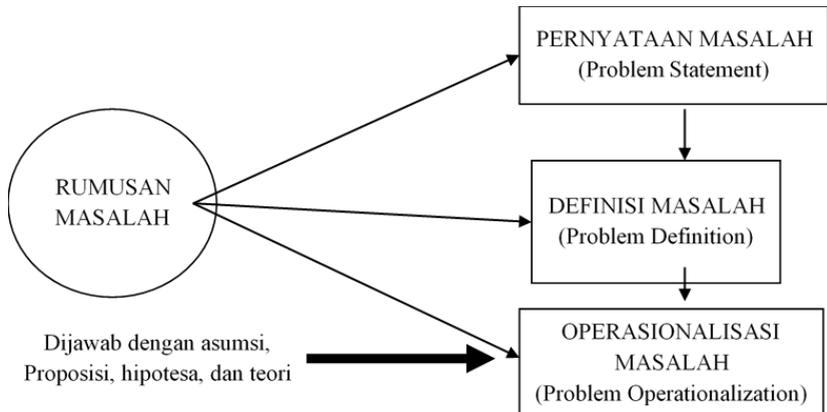
## 2. Jenis-Jenis Permasalahan dalam Budaya, Sosial dan Politik

### a. Masalah yang bersifat Umum

- 1) Kemiskinan
- 2) Keadilan Sosial
- 3) Pemerataan
- 4) Penataan Kelembagaan
- 5) Demokrasi
- 6) Hak Azasi Manusia
- 7) Supremasi dan Penegakan Hukum
- 8) Lingkungan Hidup
- 9) Ketidakpercayaan Sosial (*social distrust*) dan Kebohongan Publik (*public lie*)
- 10) Penyalahgunaan Obat Terlarang (*psikotropika*)
- 11) Persamaan gender (*egalitarian*)
- 12) Kebebasan (*the freedom*)

- 13) Pemberdayaan SDM (*empowerment*)
  - 14) Terorisme dan Separatisme
  - 15) Aborsi dan Prostitusi
  - 16) Pornografi dan Pornoaksi
  - 17) Konflik Peradaban (*civilization conflict*)
  - 18) Kebebasan Informasi Publik (KIP), dsb.
- b. Masalah yang bersifat Khusus
- 1) Tingginya jumlah pengangguran
  - 2) Kesenjangan pembangunan
  - 3) Rendahnya kualitas SDM ((Pendidikan)
  - 4) Menurunnya kualitas SDA
  - 5) Rendahnya penegakan hukum dan keadilan
  - 6) Rendahnya kualitas pelayanan kepada public
  - 7) Belum optimalnya fungsi kelembagaan
  - 8) Ancaman separatisme dan terorisme
  - 9) Tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas/korupsi  
(konvensional, transnasional)
  - 10) Rendahnya kemampuan Hankam
  - 11) Kekerasan atas nama agama

### c. Kerangka Pemecahan Masalah



### 3. Peran Teori dalam Pemecahan Masalah

Adapun Peranan Teori daalam pemecahan Masalah

#### a. Teori Sebagai Kerangka Kerja Untuk Melakukan Penelitian

Mengenai pentingnya teori sebagai kerangka kerja untuk penelitian, dimaksudkan untuk mencegah praktek – praktek pengumpulan data yang tidak memberikan sumbangan bagi pemahaman peristiwa. Oleh karena itu sebuah teori yang berperan sebagai kerangka kerja tersebut, implikasinya bahwa teori harus memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1) Teori harus mampu membantu mensistematisasikan, menyusun data, maupun pemikiran tentang data sehingga tercapai penelitian yang logis diantara aneka ragam data itu, yang semula kacau balau. Di

sinilah teori berfungsi sebagai kerangka kerja atau pedoman, bagan yang sistematisasi maupun menjadi sistem acuan.

- 2) Mampu memberikan suatu skema atau rencana sementara mengenai medan yang semula belum dipetakan sehingga terdapat suatu orientasi.
  - 3) Mampu menunjukkan atau menyarankan arah untuk penyelidikan lebih lanjut.
- b. Teori memberikan suatu kerangka kerja bagi pengorganisasian butir-butir informasi tertentu

Dalam hal ini fakta-fakta, proposisi, dan kaidah-kaidah itu dapat diturunkan dari teori tersebut dan disusun secara sistematis, yang dilengkapi dengan ciri-ciri pokok selanjutnya, yaitu keumuman (*generality*), rasionalis, objektivitas, kemampuan diperiksa kebenarannya dan kemampuan menjadi milik umum. Hal ini dapat dipahami karena semua teori pada hakekatnya berusaha untuk memenuhi fungsi itu. Dalam analogi ini dapat dimisalkan tentang teori belajar Robert Gagne. Menurut pandangannya, belajar itu merupakan faktor yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan. Pandangan teoritik yang dirumuskan Robert Gagne memberikan sintesis dari penemuan-penemuan yang sangat kompleks dan beragam, menurutnya terdapat lima jenis belajar,

yaitu belajar informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, keterampilan motorik, dan belajar sikap.

c. Teori Berguna Untuk Mengungkapkan Kompleksitas Peristiwa Yang Kelihatannya Sederhana

Secara umum, fungsi ketiga dari suatu teori adalah bahwa teori sering mengungkapkan seluk beluk dan kompleksitas peristiwa-peristiwa yang tampaknya sederhana. Suatu contoh khusus adalah hakekat dan jenis-jenis belajar factor-faktor yang berpengaruh terhadap belajar dari model Bandura (1971). Untuk sebagian besar kejadian, penjelasan yang dahulu diberikan terbatas pada segi peniruannya saja. Artinya, pelajaran menirukan model dan mendapat reward atau hadiah. Karena melakukan aktivitas yang diharapkan. Namun, teori belajar sosial dari Bandura ternyata menunjukkan hal yang kompleks sebab mengenai situasi waktu, pengamatan penunjukan tingkah laku hasil model sehari-hari dan berminggu-minggu, mengenali kondisi belajar untuk gejala yang rumit penerapannya. Dengan demikian, kejadian yang relatif sederhana yaitu tentang proses imitasi modeling (peniruan model) ternyata kompleks karena memiliki implikasi yang luas bagi teori belajar dan pembelajarannya.

d. Teori Berfungsi Untuk Mengorganisasi kembali Pengalaman-Pengalaman Sebelumnya

Di dalam ilmu pengetahuan, keberadaan teori-teori lama mutlak diadakan peninjauan kembali untuk dikaji dan diuji validitasnya dan relevansinya secara mendalam. Dalam hal ini dapat diambil contoh dalam fisika yang mengorganisasikan kepercayaan intuitif ialah hukum kelembaman (inersia) yang menyatakan bahwa suatu benda akan terus ke dalam arah geraknya sampai ada kekuatan luar yang bekerja pada benda itu. Akan tetapi, kepercayaan yang sudah diterima secara umum yang berasal dari Aristoteles justru sebaliknya. Analisisnya menjelaskan suatu benda dalam keadaan gerak hanya jika benda itu dikenal oleh suatu kekuatan. Demikianlah, ditemukannya hukum kelembaman menghendaki perlu disusunnya kembali kepercayaan akal sehat (Suppes, 1974 : 5).

e. Teori Berfungsi Untuk Prediksi Dan Kontrol

Hal ini dikemukakan oleh Kerlinger (2000:16) bahwa di samping ilmuwan mempersoalkan penjelasan dan pemahaman tentang ilmu, juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan prediksi dan kontrol. Para pendukung pandangan ini dapat mengatakan bahwa edukasi tentang suatu teori terletak pada kekuatan

prediksinya. Jika dengan menggunakan suatu teori kita mampu membuat suatu prediksi yang akurat maka teori itu akan terkukuhkan. Tidak perlu lagi mencari lebih lanjut penjelasan-penjelasan yang melandasinya. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat membuat prediksi yang andal, berarti dapat melakukan kontrol; mengingat kontrol itu dapat dijabarkan dan prediksi.